

Regulasi Impor Perangkat Elektronik dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Perlindungan Industri Nasional: Systematic Literature Review

Isabella Sabrina Sirait¹, Ghina Nabilah Effendi²

¹ Universitas Terbuka and siraitabel502@gmail.com

² UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi and ghinanabilaheffendi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya arus impor perangkat elektronik sebagai dampak globalisasi perdagangan dan perkembangan perdagangan digital yang semakin pesat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi industri nasional, terutama dalam aspek daya saing, perlindungan pasar domestik, dan penguatan industri lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi impor perangkat elektronik, mengidentifikasi dampaknya terhadap industri nasional, serta mengkaji efektivitas kebijakan publik dalam perlindungan industri nasional melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik SLR melalui tahapan identification, screening, eligibility, dan inclusion terhadap artikel ilmiah nasional dan internasional periode 2020–2026 yang diperoleh dari Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan Garuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi impor seperti pembatasan impor, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan pengawasan perdagangan digital memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas industri nasional. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan berupa ketergantungan impor, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan kapasitas industri domestik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada penguatan daya saing industri nasional.

Kata Kunci: Regulasi Impor, Perangkat Elektronik, Kebijakan Publik, Industri Nasional, Systematic Literature Review.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing flow of electronic device imports as an impact of trade globalization and the rapid development of digital commerce. This condition creates challenges for national industries, particularly in terms of competitiveness, domestic market protection, and the strengthening of local industries. This study aims to analyze regulations on electronic device imports, identify their impacts on national industries, and examine the effectiveness of public policies in protecting national industries through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The research method employs a qualitative approach using the SLR technique through the stages of identification, screening, eligibility, and inclusion of national and international scientific articles published during the 2020–2026 period, obtained from Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, and Garuda. The results indicate that import regulations such as import restrictions, the implementation of Indonesian National Standards (SNI), Domestic Component Level (TKDN) policies, and digital trade supervision play an important role in maintaining the stability of national industries. However, policy implementation still faces obstacles, including import dependency, weak supervision, and limited capacity of domestic industries. Therefore, more adaptive, integrated, and competitiveness-oriented policies are needed to strengthen national industries.

Keywords: Import Regulation, Electronic Devices, Public Policy, National Industry, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi dan transformasi digital telah mendorong peningkatan perdagangan internasional, khususnya pada sektor perangkat elektronik. Kemajuan teknologi informasi, pertumbuhan e-commerce, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk digital menyebabkan arus impor perangkat elektronik mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh semakin terbukanya pasar

global dan percepatan adopsi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat. Paun et al. (2024) menjelaskan bahwa perkembangan e-commerce global menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat distribusi produk elektronik lintas negara melalui integrasi pasar digital dan peningkatan perilaku konsumsi berbasis teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan elektronik telah berkembang menjadi bagian penting dari sistem ekonomi global yang kompetitif dan saling terhubung. Di Indonesia, peningkatan impor perangkat elektronik tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya permintaan konsumen, tetapi juga oleh perkembangan transformasi digital dan implementasi Society 5.0 yang mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan. Rohayati dan Abdillah (2024) menyatakan bahwa transformasi digital di Indonesia menciptakan kebutuhan besar terhadap perangkat elektronik sebagai sarana pendukung aktivitas industri, pendidikan, komunikasi, serta pelayanan publik.

Selain itu, perkembangan industri kendaraan listrik dan teknologi energi berkelanjutan turut meningkatkan kebutuhan impor komponen elektronik dan teknologi pendukung lainnya. Damanik et al. (2024) menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap teknologi dan komponen impor, khususnya pada sektor baterai, semikonduktor, dan perangkat elektronik pendukung infrastruktur kendaraan listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa impor perangkat elektronik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan ekonomi dan modernisasi teknologi nasional.

Peningkatan impor perangkat elektronik di sisi lain menimbulkan tantangan terhadap keberlangsungan industri nasional. Produk impor yang memiliki harga kompetitif dan penguasaan teknologi yang lebih maju menyebabkan industri lokal mengalami kesulitan dalam bersaing, terutama bagi pelaku usaha nasional dan UMKM di bidang elektronik. Ketergantungan terhadap produk luar negeri berpotensi melemahkan kapasitas produksi domestik serta menghambat penguatan industri nasional dalam jangka panjang. Khayam et al. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan teknologi pencahayaan dan elektronik di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk ketergantungan terhadap komponen impor dan rendahnya penguasaan teknologi industri dalam negeri.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengendalikan impor perangkat elektronik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap daya saing industri nasional dan stabilitas ekonomi domestik. Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan regulasi impor yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pasar, perkembangan teknologi, dan perlindungan industri nasional. Kebijakan seperti tarif impor, bea masuk, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), standarisasi produk elektronik, serta pengawasan perdagangan internasional menjadi instrumen penting dalam pengendalian impor perangkat elektronik. Lestari (2022) menjelaskan bahwa rekonstruksi kebijakan ekonomi dan perpajakan berbasis circular economy menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan sistem industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing di tengah tekanan perdagangan global.

Namun demikian, efektivitas regulasi impor dalam mendukung perlindungan industri nasional masih menjadi perdebatan dalam berbagai penelitian karena adanya kepentingan antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan pasar domestik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis regulasi impor perangkat elektronik dalam perspektif kebijakan publik serta mengidentifikasi dampaknya terhadap perlindungan industri nasional melalui pendekatan

Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik sekaligus menjadi referensi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan impor yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat daya saing industri nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji regulasi impor perangkat elektronik dalam perspektif kebijakan publik dan perlindungan industri nasional. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan analisis yang sistematis, terstruktur, dan komprehensif terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta kesenjangan penelitian terkait kebijakan impor perangkat elektronik dan dampaknya terhadap industri nasional. Penelitian difokuskan pada kajian literatur ilmiah yang membahas regulasi impor, kebijakan perdagangan internasional, perlindungan industri domestik, dan implementasi kebijakan publik pada sektor elektronik.

Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai database ilmiah nasional dan internasional, yaitu Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan Garuda. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian artikel menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “regulasi impor elektronik”, “kebijakan impor”, “perlindungan industri nasional”, “electronic import regulation”, dan “public policy on imports”. Artikel yang dipilih merupakan jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020–2026 dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi berupa artikel peer-reviewed, artikel full text, serta penelitian yang membahas kebijakan impor dan dampaknya terhadap industri nasional. Sementara itu, artikel opini, literature review yang tidak relevan, dan publikasi tanpa akses full text dikeluarkan dari proses seleksi penelitian.

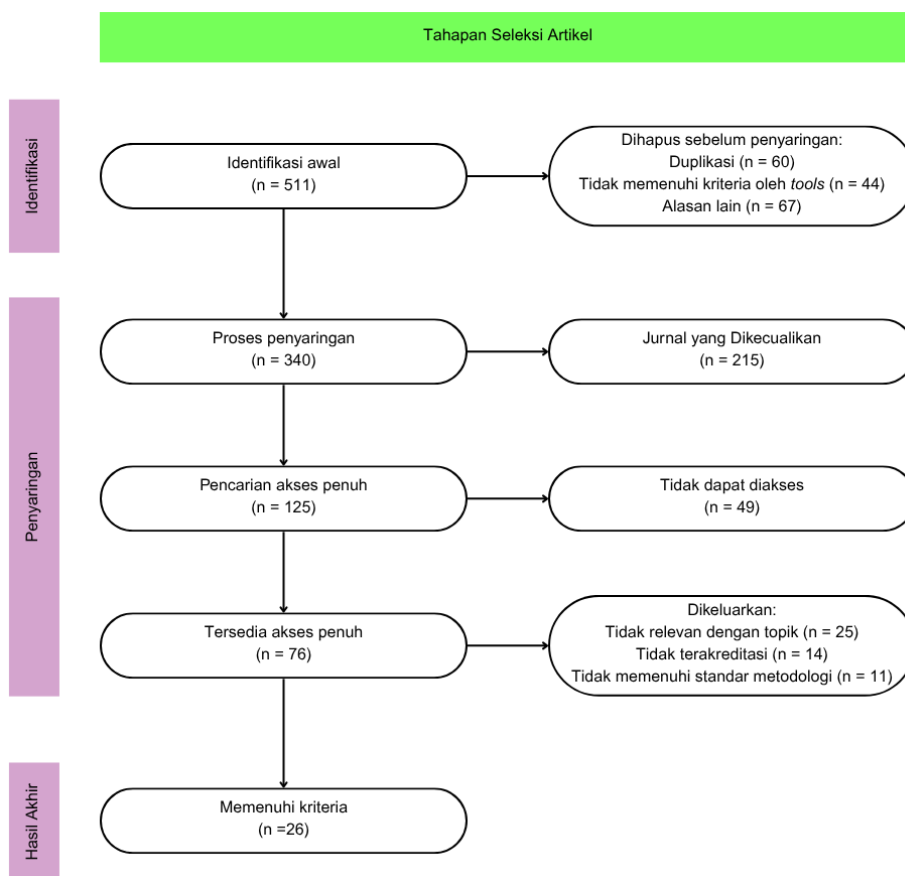
Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis melalui proses identification, screening, eligibility, dan inclusion untuk memastikan kualitas serta relevansi sumber literatur yang digunakan. Pada tahap identification, peneliti mengidentifikasi seluruh artikel yang diperoleh dari database berdasarkan kata kunci penelitian. Tahap screening dilakukan dengan menyeleksi artikel berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan fokus penelitian. Selanjutnya, tahap eligibility dilakukan dengan meninjau kelayakan isi artikel secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian. Artikel yang memenuhi seluruh kriteria kemudian masuk pada tahap inclusion sebagai sumber utama analisis penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, sintesis literatur, dan komparasi hasil penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antara regulasi impor perangkat elektronik, efektivitas kebijakan publik, serta upaya perlindungan industri nasional di tengah dinamika perdagangan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap identifikasi awal dalam penelitian ini menghasilkan 511 rekaman yang diperoleh dari berbagai basis data ilmiah nasional maupun internasional yang relevan dengan topik regulasi impor perangkat elektronik dalam perspektif kebijakan publik dan perlindungan industri nasional pada periode 2022–2026. Pada tahap penyaringan awal, sebanyak 171 rekaman dikeluarkan, yang terdiri dari 60 artikel duplikat, 44 artikel yang tidak sesuai dengan kriteria kelayakan awal, serta 67

rekaman yang tidak dapat diakses atau diolah akibat keterbatasan teknis. Setelah tahapan tersebut, tersisa 340 rekaman yang kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstrak untuk menilai relevansinya dengan fokus penelitian mengenai regulasi impor perangkat elektronik, implementasi kebijakan perdagangan, serta perlindungan industri nasional dalam menghadapi arus perdagangan global dan digitalisasi ekonomi. Dari proses seleksi tersebut, sebanyak 215 rekaman dieliminasi karena tidak relevan dengan fokus penelitian, sehingga 125 artikel dilanjutkan ke tahap telaah secara lebih mendalam.

Dari 125 artikel yang lolos seleksi awal, sebanyak 49 artikel tidak dapat diakses karena keterbatasan akses (paywall), sehingga hanya 76 artikel yang dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil evaluasi mendalam menunjukkan bahwa 50 artikel tidak memenuhi kriteria inklusi, yang terdiri atas 25 artikel yang tidak secara spesifik membahas regulasi impor perangkat elektronik atau perlindungan industri nasional, 14 artikel yang diterbitkan pada jurnal tidak terindeks atau tanpa proses peer-review, serta 11 artikel yang memiliki kualitas metodologi kurang memadai. Seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan mengacu pada alur PRISMA sehingga diperoleh 26 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dinilai layak untuk dianalisis dalam penelitian ini.



Gambar 1. Tahapan Seleksi Artikel

Dari 26 artikel terpilih, sebanyak 10 artikel disajikan dalam bentuk tabel untuk menggambarkan secara sistematis temuan utama terkait regulasi impor perangkat elektronik, implementasi kebijakan publik, perlindungan industri nasional, dampak perdagangan internasional, serta strategi peningkatan daya saing industri domestik. Ringkasan tersebut memberikan gambaran terstruktur mengenai hubungan antara regulasi impor, pengendalian

perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, dan penguatan industri nasional dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan perkembangan ekonomi digital.

Tabel 1. Artikel yang lolos seleksi

No	Penulis & Tahun	Metode	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Topik
1	Paun et al. (2024)	Panel data analysis	Faktor utama adopsi e-commerce global	Adopsi e-commerce dipengaruhi oleh digitalisasi, kebijakan ekonomi, dan kesiapan pasar	Relevan untuk menjelaskan globalisasi perdagangan elektronik dan peningkatan impor perangkat elektronik
2	Hutagalung et al. (2025)	Penelitian hukum normatif	Transformasi regulasi perdagangan elektronik di Indonesia	Regulasi perdagangan elektronik berperan dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan pasar digital	Mendukung pembahasan regulasi impor elektronik dalam perspektif kebijakan publik
3	Haq & Purba (2022)	Penelitian yuridis empiris	Penerapan SNI pada barang elektronik	Standarisasi produk elektronik melalui SNI penting untuk perlindungan konsumen	Relevan dengan kebijakan standarisasi produk elektronik impor
4	Ardiana et al. (2025)	Penelitian hukum normatif	Implementasi TKDN dalam pengadaan pemerintah	Kebijakan TKDN memperkuat penggunaan produk lokal dan industri nasional	Relevan dengan strategi perlindungan industri nasional melalui kebijakan TKDN
5	Aliansyah et al. (2025)	Analisis kebijakan	Dampak kebijakan impor terhadap industri nasional	Kebijakan impor memengaruhi daya saing dan perlindungan ekonomi domestik	Mendukung analisis dampak impor terhadap industri nasional
6	Fizabillah et al. (2024)	Kuantitatif deskriptif	Pengaruh ekspor dan impor terhadap ekonomi Indonesia	Aktivitas impor dan ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional	Relevan dengan dampak ekonomi akibat perdagangan internasional
7	Serena & Lie (2025)	Penelitian deskriptif kualitatif	Regulasi cross-border e-commerce di Indonesia	Implementasi regulasi perdagangan digital masih menghadapi tantangan pengawasan	Relevan dengan efektivitas kebijakan publik dalam pengawasan impor digital
8	Kurniawan et al. (2026)	Penelitian hukum normatif	Hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor	Hambatan regulasi dan kepastian hukum memengaruhi efektivitas perdagangan internasional	Mendukung pembahasan hambatan implementasi kebijakan impor
9	Humonggio (2025)	Penelitian hukum normatif	Perlindungan industri nasional melalui hukum antidumping	Kebijakan antidumping diperlukan untuk melindungi industri nasional dari persaingan tidak sehat	Relevan dengan strategi perlindungan industri nasional

10	Indrasari et al. (2024)	Penelitian kualitatif	Strategi peningkatan daya saing industri berkelanjutan	Penguatan inovasi dan kebijakan industri diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional	Mendukung strategi penguatan industri lokal dan peningkatan daya saing
----	-------------------------	-----------------------	--	--	--

Sumber: Olahan Penulis (2026)

A. Regulasi Impor Perangkat Elektronik

Regulasi impor perangkat elektronik merupakan instrumen penting dalam kebijakan perdagangan nasional yang bertujuan menjaga stabilitas pasar domestik, melindungi konsumen, serta memperkuat daya saing industri nasional. Dalam konteks perdagangan digital yang semakin berkembang, pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap dinamika globalisasi ekonomi dan pertumbuhan e-commerce. Hutagalung et al. (2025) menjelaskan bahwa transformasi regulasi perdagangan elektronik di Indonesia dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan perlindungan konsumen, dan penyesuaian kebijakan terhadap perkembangan transaksi digital lintas negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi impor perangkat elektronik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional, tetapi juga menyangkut aspek keamanan produk, perlindungan konsumen, dan pengendalian arus barang elektronik di pasar domestik. Salah satu bentuk regulasi yang diterapkan pemerintah dalam pengendalian impor perangkat elektronik adalah kebijakan pembatasan impor melalui tarif, bea masuk, dan pengawasan distribusi produk elektronik. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi dominasi produk impor sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan industri lokal.

Dheolivera et al. (2025) menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan impor pada platform perdagangan digital memberikan dampak terhadap pola konsumsi masyarakat sekaligus menjadi strategi pemerintah dalam melindungi industri lokal dari persaingan produk asing yang tidak terkendali. Selain itu, Isni et al. (2025) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan impor di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ketergantungan terhadap produk luar negeri yang berpotensi melemahkan daya saing industri domestik. Dengan demikian, regulasi pembatasan impor dipandang sebagai bagian dari kebijakan proteksi ekonomi nasional dalam menghadapi liberalisasi perdagangan global.

Selain kebijakan pembatasan impor, pemerintah juga menerapkan regulasi standarisasi produk elektronik melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengawasan legalitas produk elektronik yang beredar di pasar. Penerapan standar tersebut bertujuan menjamin kualitas dan keamanan produk elektronik bagi konsumen sekaligus mencegah masuknya produk ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan industri nasional. Haq dan Purba (2022) menjelaskan bahwa penerapan SNI pada produk elektronik memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap risiko penggunaan barang elektronik yang tidak memenuhi standar keamanan. Permasalahan peredaran perangkat elektronik ilegal juga terlihat pada kasus distribusi Set Top Box ilegal yang menimbulkan kerugian konsumen serta mengganggu persaingan usaha yang sehat. Anugraini dan Rosando (2025) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap produksi dan distribusi perangkat elektronik ilegal menjadi tantangan serius dalam implementasi regulasi perdagangan elektronik di Indonesia.

Pemerintah juga memperkuat regulasi impor perangkat elektronik melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kebijakan TKDN bertujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah tingginya arus impor produk elektronik. Ardiana et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah memberikan implikasi signifikan terhadap peningkatan penggunaan produk lokal dan penguatan industri nasional, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan persaingan usaha dan kesiapan industri domestik.

Di sisi lain, pengaturan pengadaan barang dan jasa dalam sektor perdagangan elektronik juga memerlukan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif agar mampu menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan kompetitif. Suistianisa dan Lestari (2023) menjelaskan bahwa aspek hukum bisnis dan pengadaan barang menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas regulasi perdagangan dan perlindungan kepentingan nasional. Oleh karena itu, regulasi impor perangkat elektronik perlu dipahami sebagai kebijakan multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian perdagangan, tetapi juga pada perlindungan konsumen, penguatan industri nasional, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

B. Dampak Impor terhadap Industri Nasional

Peningkatan impor produk elektronik dan barang industri dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan industri nasional di Indonesia. Arus barang impor yang semakin besar menyebabkan persaingan pasar domestik menjadi semakin kompetitif, terutama bagi industri lokal yang memiliki keterbatasan pada aspek teknologi, efisiensi produksi, dan kapasitas modal. Aliansyah et al. (2025) menjelaskan bahwa kebijakan impor yang tidak terkendali dapat melemahkan perlindungan ekonomi domestik karena industri nasional harus bersaing secara langsung dengan produk luar negeri yang memiliki harga lebih murah dan kualitas yang lebih kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya impor berpotensi menurunkan daya saing industri lokal apabila tidak diimbangi dengan kebijakan proteksi dan penguatan kapasitas produksi nasional. Dampak impor terhadap industri nasional juga terlihat dari meningkatnya ketergantungan terhadap bahan baku, komponen, dan produk jadi dari luar negeri.

Ketergantungan tersebut menyebabkan industri domestik menjadi rentan terhadap perubahan kondisi perdagangan internasional dan fluktuasi pasar global. Azizah et al. (2024) menjelaskan bahwa impor input produksi memiliki pengaruh terhadap daya saing industri nasional karena sebagian besar sektor industri masih mengandalkan bahan baku dan komponen dari luar negeri untuk menjaga keberlanjutan produksi. Dalam konteks industri elektronik, kondisi ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap komponen impor dapat menghambat upaya penguatan industri nasional dan memperbesar dominasi produk asing di pasar domestik. Selain itu, Khumairoh et al. (2025) menegaskan bahwa perjanjian ekspor-impor antarnegara di kawasan ASEAN turut meningkatkan tekanan persaingan terhadap industri lokal Indonesia karena produk asing lebih mudah memasuki pasar nasional melalui skema perdagangan bebas regional. Tingginya arus impor juga memberikan dampak terhadap keberlangsungan UMKM dan pelaku industri nasional skala menengah yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan elektronik.

Produk impor yang lebih murah sering kali menyebabkan penurunan daya beli terhadap produk lokal sehingga pelaku usaha domestik mengalami kesulitan mempertahankan pangsa pasar. Silaban dan Yasin (2023) menjelaskan bahwa strategi substitusi impor dan penguatan teknologi industri menjadi langkah penting dalam menghadapi persaingan global serta meningkatkan kemampuan industri nasional dalam menciptakan inovasi produk. Hal tersebut menunjukkan

bahwa penguatan teknologi domestik dan peningkatan kualitas produksi nasional menjadi faktor penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Di sisi lain, lemahnya kemampuan adaptasi teknologi pada sebagian industri lokal menyebabkan produk domestik sulit bersaing dengan produk impor yang lebih modern dan efisien. Dalam perspektif ekonomi nasional, impor memiliki hubungan yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di satu sisi, impor dapat mendukung kebutuhan industri dan mempercepat modernisasi teknologi, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan tekanan terhadap industri domestik apabila tidak diatur secara proporsional.

Fizabillah et al. (2024) menjelaskan bahwa aktivitas ekspor dan impor memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena perdagangan internasional menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi modern. Temuan serupa disampaikan oleh Ghazali et al. (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan perdagangan internasional memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional dan perkembangan sektor industri domestik. Selain itu, Winanda et al. (2024) menegaskan bahwa impor dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi apabila diarahkan pada kebutuhan produktif dan penguatan industri nasional. Oleh karena itu, pengendalian impor perangkat elektronik perlu dilakukan secara seimbang agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan industri nasional dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

C. Perspektif Kebijakan Publik

Regulasi impor perangkat elektronik dalam perspektif kebijakan publik merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan internasional dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional. Kebijakan impor tidak hanya dipahami sebagai instrumen perdagangan, tetapi juga sebagai bentuk intervensi negara dalam mengendalikan arus barang asing agar tidak mengganggu stabilitas industri domestik. Azrimultiya (2024) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas ekspor dan impor guna menciptakan stabilitas ekonomi nasional serta menjaga keberlangsungan sektor industri dan manufaktur.

Dalam konteks perdagangan elektronik, pemerintah dituntut mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan perubahan pola perdagangan global yang semakin kompleks. Efektivitas implementasi regulasi impor sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang terintegrasi, konsisten, dan mampu menjawab tantangan perdagangan internasional modern. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian dalam penguatan industri nasional adalah penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sektor elektronik. Keziabella et al. (2025) menjelaskan bahwa regulasi TKDN elektronik memberikan dampak terhadap pengembangan produk pada perusahaan multinasional di Indonesia karena mendorong penggunaan komponen lokal dalam proses produksi.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi industri domestik dalam rantai produksi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Namun demikian, implementasi kebijakan TKDN masih menghadapi tantangan berupa kesiapan industri nasional, keterbatasan teknologi domestik, dan penyesuaian investasi perusahaan asing terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, implementasi regulasi impor perangkat elektronik juga menghadapi berbagai hambatan hukum dan administratif yang memengaruhi efektivitas pengawasan perdagangan internasional. Kurniawan et al. (2026)

menjelaskan bahwa hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor masih menjadi persoalan yang memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas kebijakan perdagangan di Indonesia.

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya transaksi cross-border e-commerce yang memungkinkan masuknya produk elektronik asing melalui platform digital lintas negara. Serena dan Lie (2025) menjelaskan bahwa regulasi cross-border e-commerce di Indonesia masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan perlindungan pasar domestik. Selain itu, perkembangan digitalisasi perdagangan internasional juga menuntut adanya penyesuaian regulasi terhadap sistem perdagangan elektronik modern. Nurafendi et al. (2026) menegaskan bahwa implementasi digitalisasi perdagangan internasional memerlukan dukungan regulasi yang mampu menjamin efektivitas transaksi elektronik serta memperkuat tata kelola perdagangan global di Indonesia.

Dalam perspektif kepentingan ekonomi nasional, kebijakan impor perangkat elektronik perlu diarahkan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. Putra et al. (2023) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan perdagangan internasional melalui kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan keberlanjutan industri domestik. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi impor tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada stabilitas pasar dan penguatan industri lokal.

Di sisi lain, Winanda et al. (2024) menjelaskan bahwa aktivitas ekspor dan impor memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga kebijakan perdagangan perlu dirumuskan secara proporsional agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa melemahkan industri nasional. Oleh karena itu, efektivitas regulasi impor perangkat elektronik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan aspek perdagangan internasional, perlindungan industri nasional, dan transformasi digital dalam satu kerangka kebijakan publik yang komprehensif.

D. Strategi Perlindungan Industri Nasional

Strategi perlindungan industri nasional menjadi bagian penting dalam menghadapi meningkatnya arus impor perangkat elektronik dan persaingan perdagangan global. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas industri domestik agar memiliki daya saing yang berkelanjutan di tengah dominasi produk asing. Diana dan Yasin (2024) menjelaskan bahwa strategi industrialisasi memiliki peran penting dalam pembangunan negara melalui penguatan struktur industri unggulan dan peningkatan kemampuan produksi nasional. Dalam konteks industri elektronik, penguatan industri lokal tidak hanya dilakukan melalui pembatasan impor, tetapi juga melalui pengembangan teknologi domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan investasi industri nasional. Selain itu, Lestari et al. (2025) menegaskan bahwa perkembangan industri di Indonesia memerlukan strategi yang terintegrasi antara kebijakan ekonomi, penguatan sektor manufaktur, dan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan industri dalam negeri agar mampu bertahan menghadapi dinamika perdagangan internasional.

Salah satu bentuk perlindungan industri nasional dilakukan melalui penerapan kebijakan antidumping, pengawasan impor ilegal, serta pemberian insentif terhadap industri strategis domestik. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar nasional dari praktik perdagangan tidak sehat yang dapat merugikan industri lokal. Humonggio (2025) menjelaskan bahwa penerapan

hukum antidumping menjadi instrumen penting dalam melindungi industri nasional dari praktik subsidi silang dan persaingan tidak sehat pada sektor manufaktur strategis. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap barang impor ilegal dan pengendalian distribusi produk elektronik menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi antara pemerintah, aparat pengawasan, dan pelaku industri. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan insentif industri berupa kemudahan investasi, subsidi produksi, dan dukungan fiskal untuk meningkatkan kemampuan industri nasional dalam menghasilkan produk yang kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Perlindungan industri nasional juga perlu diarahkan pada peningkatan daya saing industri melalui inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. Indrasari et al. (2024) menjelaskan bahwa strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan inovasi, efisiensi produksi, dan pengembangan industri berbasis teknologi. Dalam konteks industri elektronik, inovasi menjadi faktor utama dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Selain itu, Syafira dan Santoso (2025) menegaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap merek dan produk industri memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan industri nasional di era digital. Perlindungan terhadap inovasi dan identitas produk domestik menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing industri nasional agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan di tengah tekanan perdagangan internasional dan dominasi produk impor.

E. Analisis Sintesis Literatur

Berdasarkan hasil sintesis literatur, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa regulasi impor perangkat elektronik memiliki hubungan yang erat dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas industri nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Persamaan temuan dalam berbagai penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan pembatasan impor, penerapan standar nasional, penguatan TKDN, serta pengawasan perdagangan digital menjadi instrumen utama dalam melindungi industri nasional dari dominasi produk asing. Hutagalung et al. (2025) dan Serena dan Lie (2025) menegaskan bahwa transformasi perdagangan elektronik dan perkembangan cross-border e-commerce menuntut regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan sistem perdagangan global.

Selain itu, Ardiana et al. (2025) dan Keziabella et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi TKDN memiliki kontribusi terhadap penguatan penggunaan produk lokal meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek kesiapan industri dan investasi teknologi domestik. Temuan lain dari Aliansyah et al. (2025), Khumairoh et al. (2025), serta Humonggio (2025) memperlihatkan bahwa perlindungan industri nasional memerlukan kombinasi kebijakan perdagangan, pengawasan impor, dan strategi proteksi hukum terhadap praktik perdagangan tidak sehat.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan temuan antarpelitian terkait efektivitas implementasi kebijakan impor dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Sebagian penelitian menilai bahwa kebijakan impor mampu menjaga stabilitas pasar dan memperkuat industri lokal, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku dan teknologi impor masih menjadi hambatan utama bagi pengembangan industri domestik.

Research gap dalam penelitian ini terlihat pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas regulasi impor perangkat elektronik melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif kebijakan publik, perdagangan digital, perlindungan konsumen, dan

daya saing industri nasional secara komprehensif. Oleh karena itu, implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi impor yang tidak hanya berorientasi pada pembatasan perdagangan, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kapasitas industri nasional, peningkatan inovasi teknologi, penguatan pengawasan digital, serta harmonisasi kebijakan perdagangan internasional dengan kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Regulasi impor perangkat elektronik merupakan bagian penting dari kebijakan publik dalam menjaga stabilitas perdagangan nasional dan melindungi industri domestik di tengah meningkatnya globalisasi ekonomi serta perkembangan perdagangan digital. Berdasarkan hasil *systematic literature review*, kebijakan pemerintah seperti pembatasan impor, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan pengawasan perdagangan elektronik memiliki peran strategis dalam mengendalikan arus produk asing serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa impor perangkat elektronik memberikan dampak yang kompleks terhadap industri nasional, yaitu mampu mendukung kebutuhan teknologi dan produksi, tetapi sekaligus meningkatkan persaingan pasar, ketergantungan terhadap produk luar negeri, dan tekanan terhadap keberlangsungan industri lokal serta UMKM domestik. Selain itu, efektivitas regulasi impor sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi kebijakan, kemampuan pengawasan pemerintah, kesiapan industri nasional, dan adaptasi terhadap perkembangan perdagangan digital global.

Strategi perlindungan industri nasional perlu diarahkan pada penguatan industri lokal, peningkatan inovasi teknologi, pemberian insentif industri, pengawasan impor ilegal, serta perlindungan hak kekayaan intelektual agar industri nasional mampu berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi impor perangkat elektronik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian perdagangan internasional, tetapi juga sebagai kebijakan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, perlindungan konsumen, dan peningkatan kemandirian industri Indonesia di era perdagangan global.

REFERENSI

- Aliansyah, D. K., Tyasari, H. A., & Putri, K. M. (2025). Telaah dampak kebijakan impor terhadap industri tekstil nasional: Idealitas perlindungan ekonomi domestik. *Forschungsforum Law Journal*, 2(02), 142–169. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.11189>
- Anugraini, P. A., & Rosando, A. F. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku produksi, distribusi, dan penjualan Set Top Box ilegal yang menimbulkan kerugian konsumen di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 817–828. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17927499>
- Ardiana, O. D., Azzahra, D., Sachmaso, H. H., & Fawwaz, R. (2025). Penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah dan implikasinya terhadap persaingan usaha. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 578–589. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17667629>
- Azizah, I. N. N., Syaikat, Y., & Hidayat, N. K. (2024). Dampak impor input kapas dan tenaga kerja terhadap daya saing pakaian jadi Indonesia di negara tujuan utama. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 7(1), 162–175. <https://doi.org/10.37637/ab.v7i1.1503>

- Azrimultiya, V. (2024). Peran kebijakan pemerintah dalam ekspor dan impor pada sektor agrikultur dan manufaktur di Indonesia. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 7(2), 164–172.
- Damanik, N., Octavia, R. C., & Hakam, D. F. (2024). Powering Indonesia's Future: Reviewing the Road to Electric Vehicles Through Infrastructure, Policy, and Economic Growth. *Energies*, 17(24), 6408. <https://doi.org/10.3390/en17246408>
- Dheolivera, F., Agatha, L. J., & Handayani, S. (2025). Implikasi kebijakan pembatasan impor oleh Shopee terhadap konsumen dan perlindungan industri lokal. *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 220–228. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v2i4.1256>
- Diana, S. R., & Yasin, M. (2024). Strategi industrialisasi: Analisis struktur industri unggulan pada pembangunan negara. *JRP: Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 121–132. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3430>
- Fizabillah, A. F., Sitohang, A. C., Dafana, E. P. R., Nafis B., E., Bramantyo, D., Penga, J. A. T., Setiawan, M. R. A., & Hayon, M. K. (2024). Pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 4(3), 155–162. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v4i3.858>
- Ghazali, I., Febriansyah, F., & Hidayah, T. (2025). Analisis dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *Journal of Economics Development Research*, 1(4), 131–143. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i4.206>
- Haq, M., & Purba, J. (2022). Perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru. *Journal of Criminology and Justice*, 1(2), 43–46. <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/261>
- Humonggio, A. S. (2025). Penerapan hukum antidumping dan perlindungan industri nasional terhadap praktik subsidi silang di sektor manufaktur strategis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 8020–8035. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2479>
- Hutagalung, O., Saragih, Y. M., Sembiring, T. B., Purba, P., & Siregar, R. A. F. (2025). Transformasi regulasi perdagangan elektronik dalam meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5436>
- Indrasari, P., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2024). Strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri agro yang berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(2), 885–899. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i2.3246>
- Isni, I. Y., Zulkarnain, & Septiawan, B. (2025). Implementasi perubahan kebijakan dan peraturan impor tas terhadap produk lokal, studi kasus di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v17i1.3854>
- Keziabella, Asfarisyah, F. N., Asfarisyah, F. N., & Abdullah, T. M. K. (2025). Dampak regulasi TKDN elektronik terhadap pengembangan produk di perusahaan multinasional di Indonesia. *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 4(10), 1023–1034.
- Khayam, U., Zaeni, A., Banjar-Nahor, K. M., Hamdani, D., Sinisuka, N. I., Dupuis, P., Zissis, G., & Canale, L. (2023). Status of Lighting Technology Application in Indonesia. *Sustainability*, 15(7), 6283. <https://doi.org/10.3390/su15076283>
- Khumairoh, Z., Khairunisa, R. M., Wardani, K. I., Atmaja, S. P., Dewi, F. K., Sabillillah, F., Putri, M. A., & Fairuzzaman, F. (2025). Dampak perjanjian ekspor impor antar negara di ASEAN pada industri lokal di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(9), 41–50. <https://doi.org/10.6679/texbz593>
- Kurniawan, R., Rico, & Handayani, S. (2026). Hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3), 1–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5629>
- Lestari, A. E. P., Fadilah, A. N., Setiawati, S., Riyadi, E. V., & Aprianto, N. E. K. (2025). Analisis strategi dan perkembangan industri di Indonesia. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 86–98. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1118>
- Lestari, E. R. (2022). Tax Policy Reconstruction toward Implementation of Circular Economy in Indonesia. *Proceedings*, 83(1), 68. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083068>
- Nurafendi, A., Myranika, A., Setyawan, A. E., Retno, E., & Pasrah, R. (2026). Efektivitas UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) 2017 dalam mendukung digitalisasi perdagangan internasional studi komparatif implementasi di Australia dan Republik Rakyat Tiongkok serta implikasinya bagi Indonesia. *Berajah Journal*, 6(2), 322–328. <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/view/322>
- Paun, C., Ivascu, C., Olteteanu, A., & Dantis, D. (2024). The Main Drivers of E-Commerce Adoption: A Global Panel Data Analysis. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 19(3), 2198–2217. <https://doi.org/10.3390/jtaer19030107>

- Putra, A. K., Rafi, A., Darmawan, R. P., & Wikansari, R. (2023). Peran pemerintah meningkatkan perdagangan internasional khususnya ekspor. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 2(3), 115–125. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.94>
- Rohayati, Y., & Abdillah, A. (2024). Digital Transformation for Era Society 5.0 and Resilience: Urgent Issues from Indonesia. *Societies*, 14(12), 266. <https://doi.org/10.3390/soc14120266>
- Serena, M. A., & Lie, G. (2025). Analisis regulasi dan tantangan implementasi dalam transaksi cross-border e-commerce di Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 984–992. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7088>
- Silaban, T. R., & Yasin, M. (2023). Strategi persaingan industri dan substitusi industri impor terhadap kemajuan teknologi. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 1(4), 99–115. <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i4.1420>
- Suistianisa, I. A., & Lestari, A. Y. (2023). Hukum keperdataan dan bisnis dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. *Proceeding Legal Symposium*, 1(1), 94–111. <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.91>
- Syafira, N. D. W., & Santoso, B. (2025). Strategi perlindungan dan optimalisasi hak kekayaan intelektual terhadap merek dalam era digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2538–2550. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Winanda, S. N., Fadil, C., & Imaningsih, N. (2024). Pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 860–870. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14542503>
- Winanda, S. N., Fadil, C., & Imaningsih, N. (2024). Pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 860–870. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14542503>